

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul, Nugraha, 2010, *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Universitas Esa Unggul.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Perlindungan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bondan, Gandjar Laksmana Bonaprapta. *Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: KPK.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan, 1987, *Surat Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , Andi, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya Harahap. 1996. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Bandung: Sinar Grafika.
- , Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T, dkk, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Perangin-angin, E, 2006, *Hukum Waris: Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat*, Jakarta: Fakultas Hukum UI.

Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009 *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

-----, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno, 1999 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

-----, 2002 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

-----, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mas, Marwan, 2014 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nasional, Departemen Pendidikan, 2003 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Nugraha Abdul K, 2010 *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Universitas Esa Unggul.

Rommelink, J, 2003, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Jurnal dan Makalah

Alkostar, Artidjo. Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial, Buletin Komisi Yudisial, Vol. 1, 2006.

Lattan, Artji Judiols. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* : Vol. 12, No. 1, Oktober 2014.

Atmasasmita, Romli, Teori dan Kapita Seleka Kriminologi, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), h. 140-141. Lihat juga Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara, (Malang: In-TRANS Publishing, 2008).

Karisa, Immaculata Anindya. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak, *Jurnal Verstek* : Vol 8, No.1. November 2017.

Ruman, Suhardi Yustinus. Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Jurnal Humaniora* : Vol. 3, No 2, Oktober 2012.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 , No 66. Juli 2019.

Widodo,Fajar, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Jurnal Yuridika*, Volume 30, Nomor 3, Desember 2015.

Yunanto, Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Progresif* : Vol. 7, No. 2, Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----,Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

-----,Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

-----,Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-----,Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004

-----,Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

-----,Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

-----,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus- TPK/2020/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

